

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

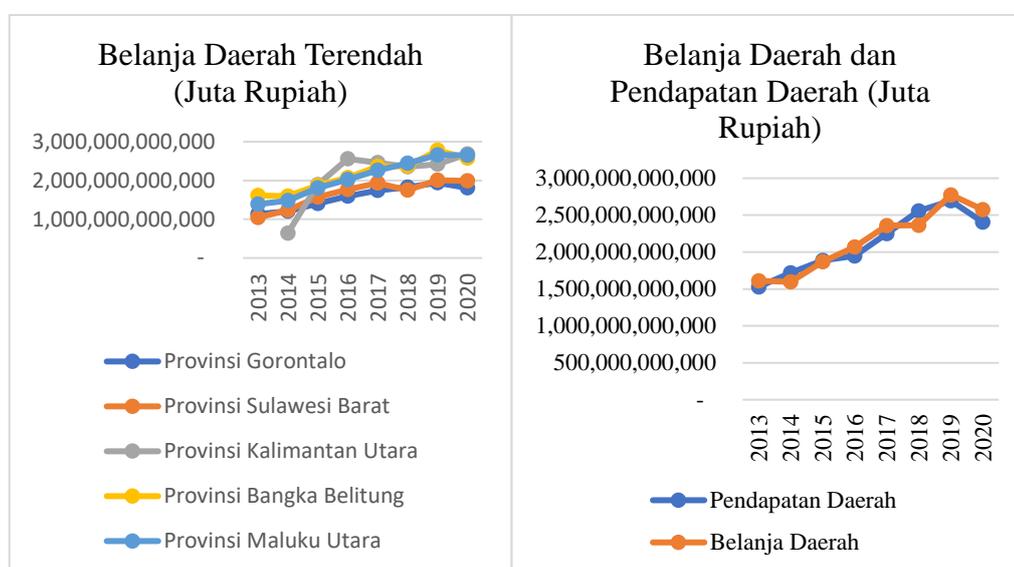
Pemerintah daerah melakukan pengeluaran atau belanja daerah untuk memberikan pelayanan publik menjadi kewenangannya provinsi, kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah. Pemerintah dalam ekonomi publik mempunyai tiga fungsi utama ialah pertama fungsi alokasi, alokasi bermakna pemerintah mempunyai fungsi dalam merencanakan alokasi sumber daya yang efisien. Fungsi distribusi yaitu bermakna pemerintah memiliki mewujudkan terjadinya pemerataan (*equity*) dan keadilan (*fairness*), sedangkan fungsi stabilisasi bermakna pemerintah berfungsi memastikan bahwa berbagai persoalan makroekonomi seperti inflasi, nilai kurs, pengangguran, dan kemiskinan dapat terkendali. Fungsi alokasi sendiri dapat lebih efektif diserahkan kepada pemerintah daerah, sedangkan fungsi distribusi dan stabilisasi lebih baik dipegang pemerintah pusat. Jadi, berdasarkan fungsi ekonomi publik untuk mewujudkan efisiensi (alokasi) ekonomi itulah yang dijadikan dasar dari pelaksanaan desentralisasi fiskal untuk pelimpahan wewenang serta tanggung jawab oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah mengenai sumber-sumber pendapatan dan keharusan pembelanjaan/belanja daerah (Ananda, 2017). Belanja daerah yaitu seluruh kewajiban daerah seperti: wajib, pilihan, dan urusan yang termasuk kedalam bidang tertentu yang bisa dilakukan bersama-sama oleh pemerintahan daerah. Belanja daerah dalam kata lain bagian dari pengeluaran daerah. Belanja langsung dan belanja tidak langsung yaitu bagian dari belanja daerah (Yulinchton, Ariani, & Triwahyuningtyas, 2022). Dari adanya otonomi daerah, maka pemerintah diharuskan dalam mengelola dengan baik dan efektif keuangan daerah. Belanja daerah ialah alokasi keuangan yang harus dilaksanakan secara efektif serta efisien. Belanja daerah bisa dijadikan sebagai patokan penerapan kewenangan daerah. (Asih & Irawan, 2018). Belanja daerah dapat dikatakan seluruh pengeluaran pemerintah daerah untuk suatu tahun anggaran.

Peningkatan pengeluaran pemerintah daerah ialah salah satu pendekatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja daerah sendiri dapat berdampak

pada kesejahteraan masyarakat karena menentukan tingkat pelayanan publik yang akan diberikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Rendahnya sumber pendapatan daerah yang disebabkan oleh situasi perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akibat pandemi Covid-19 yang terjadi secara umum sehingga menyebabkan penurunan volume menjadi penyebab rendahnya belanja daerah yang ada pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hampir semua sektor korporasi, kecuali pertanian, terlibat dalam perdagangan global. Akibat anjloknya pasar timah dunia, kinerja pertambangan dan pengolahan menurun sehingga menyebabkan harga turun. Akibat realokasi dan *refocusing* anggaran, serta pemberlakuan PSBB yang berakibat kepada perputaran ekonomi, sektor korporasi lainnya mengalami resesi. (Valeriani & Wulandari, 2022). Hal ini mengakibatkan pendapatan daerah pada tahun 2019-2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurun yang sangat tinggi sehingga mempengaruhi pada belanja daerahnya juga yang menurun ditahun 2019-2020. Untuk meningkatkan belanja daerah, pemerintah harus bekerja untuk meningkatkan PAD, menggunakan dengan maksimal transfer pemerintah, namun tidak dijadikan sebagai sumber penerimaan pendapatan yang pertama. (Herlina, 2019)

Dalam teorinya Adolf Wagner mengatakan kalau pengeluaran pemerintah serta aktivitas pemerintah semakin lama akan semakin naik (Idris, 2016). Menurut Wagner, ketika pendapatan per kapita ekonomi naik, demikian juga pengeluaran pemerintah pun meningkat. Pemerintah membelanjakan biaya dalam melaksanakan fungsi administrasi serta perlindungan, yang mana dengan adanya penambahan penduduk akan terdapat meningkatnya pengeluaran untuk melaksanakan fungsi tersebut (Solikin, 2018). Wagner pun menyadari kalau akan ada batasan dalam tumbuhnya pengeluaran pemerintah. Terjadinya hal ini karena jika peningkatan pemerintah (G) maka akan diiringi juga oleh naiknya pajak (T), serta orang-orang yang membayar pajak pasti merasa berat apabila harus menanggung pajak yang semakin tinggi dalam membayar pajak dari pemerintah. Dari teori pengeluaran pemerintah yang dijelaskan oleh Peacock dan Wiseman Teori yang selalu disebut *the displacement effect*, berdasarkan gagasan apabila masyarakat tidak mau membayar pajak yang makin mahal dalam menanggung pembelajaran pemerintah yang terus naik sementara pemerintah selalu meningkatkan pengeluaran dan

berharap banyak dari sumber penerimaan pajak. Alasan kenaikan belanja pemerintah adalah karena ekonomi semakin besar dan beragam, pengumpulan pajak di masyarakat juga meningkat, meski tarif pajak tidak berubah. Sebagai akibat dari peningkatan penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah juga akan tinggi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa belanja daerah bisa berpengaruh pada beberapa faktor yaitu Jumlah Penduduk, PAD, PDRB, serta Ketimpangan Pendapatan. Daerah yang akan di teliti dalam temuan ini ialah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena termasuk kedalam 5 Provinsi dengan belanja daerah terendah di Indonesia. Dengan dilengkapi data sebagai berikut.



Sumber: Direktorat Jendral Pajak Kemenkeu (2013-2020)

Gambar 1. Grafik 5 Provinsi belanja daerah terendah di Indonesia tahun 2013-2020

Dalam satu periode anggaran, semua pengeluaran pemerintah daerah dianggap sebagai pengeluaran daerah. Belanja daerah ada 2 bagian yaitu belanja langsung serta belanja tidak langsung, menurut Permendagri 13 Tahun 2006, yang diubah jadi Permendagri 59 Tahun 2007 lalu kemudian berubah lagi menjadi Permendagri 21 Tahun 2011 (Kemenkeu Dirjen Perimbangan Keuangan, 2015). Jenis intervensi pemerintah yang paling efisien dalam perekonomian dianggap sebagai belanja pemerintah daerah melalui pengeluaran langsung dan tidak langsung.

Keberhasilan daerah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat amat bergantung ke peraturan pemerintah daerah dengan alokasi pembelajarannya.

Laila Mulia Dayanti, 2023

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

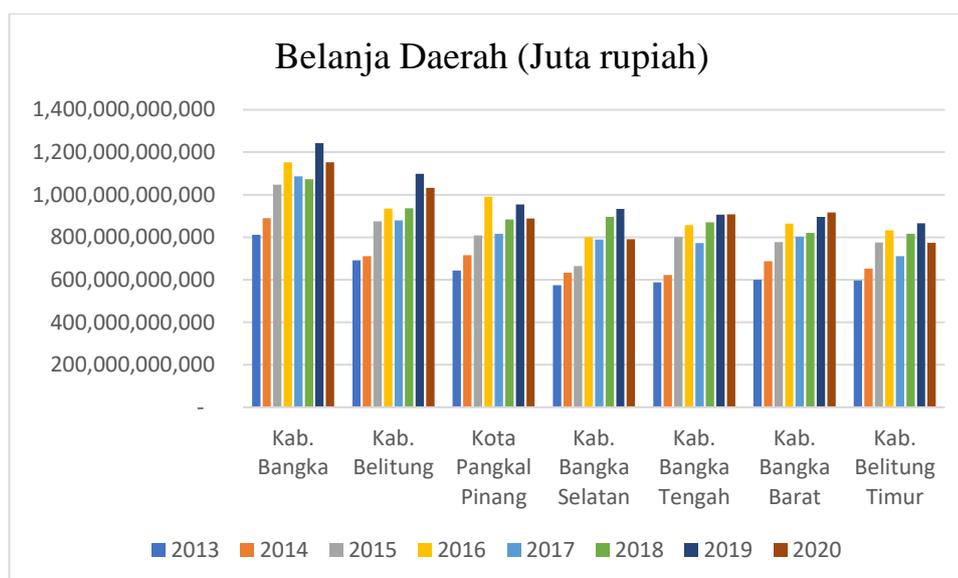
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Alokasi pembelanjaan yang bagus sangat dinantikan bisa menaikkan kemakmuran masyarakat daerah. Peningkatan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan fasilitas umum yang layak serta pengembangan jaminan sosial, diprioritaskan dalam rangka pemenuhan komitmen daerah untuk melindungi masyarakat sistem (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005). Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah ke lima provinsi dari provinsi di Indonesia dengan pendapatan daerah terendah seperti terlihat pada Gambar 1. Setelah Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan keempat. Dengan rendahnya pendapatan daerah, maka hal ini juga dapat mempengaruhi pada tinggi rendahnya belanja daerah. Fenomena yang ada pada belanja daerah jika dilihat dengan jelas pada grafik 1 khususnya pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2019-2020 belanja daerah yang diperoleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurun paling drastis jika dibandingkan dengan 4 provinsi lainnya yaitu dengan selisih sebesar Rp. 200,905,929,485.29 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 134,908,612,825.55 Provinsi Gorontalo, 16,461,231,220.94 Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara 6,589,168,274.66 dan terjadinya peningkatan belanja daerah pada Provinsi Kalimantan Utara sebesar 263,843,344,909.09. Penurunan Pembelajaan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak sebesar dengan penurunan yang terjadi pada Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Kalimantan Utara, dan Maluku Utara. Selain itu, tahun 2013-2014 ketika pendapatan daerah meningkat, belanja daerah pada 4 provinsi juga meningkat, namun berbeda dengan belanja daerah yang terjadi pada provinsi Kepulauan Bangka Belitung malah menurun.

Warga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung patut berbangga karena bila menengok ke belakang dan membandingkannya dengan provinsi yang sudah 20 tahun resmi terbentuk. Hanya ada tiga pemerintahan daerah sebelum provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdiri: Kabupaten Bangka, Kota Pangkalpinang, serta Kabupaten Belitung. Kabupaten dan kota yang sampai saat ini berjumlah 7 (tujuh) diantaranya Kab. Bangka, Kota Pangkalpinang, Kab. Belitung, Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat, dan Kab. Belitung Timur, juga diperbesar dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di sisi timur

Pulau Sumatera terdapat sebuah provinsi yang dikenal dengan Provinsi Bangka Belitung (Babel). Dengan 470 pulau kecil, dua pulau besar (Bangka dan Belitung), dan ratusan pulau kecil tambahan, provinsi Babel menawarkan potensi alam dan budaya yang luar biasa. Alhasil, pemerintah menetapkan Babel sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Provinsi Babel sedang menyiapkan dalam mengembangkan untuk tujuan wisata utama. Untuk melaksanakan KSPN Babel, sejumlah persiapan, tindakan, dan strategi disusun. Pembuatan Rencana Pembangunan Infrastruktur Permukiman salah satunya (RPIP).

Tumbuhnya potensi daerah Bangka Belitung, khususnya potensi barunya, tercermin dari banyaknya pengunjung dari luar negeri. Hal ini dapat menjadi peluang untuk pemerintah dalam mengembangkan industri penting guna mendongkrak penerimaan dan mendorong pembelajaran daerah untuk ekspansi perekonomian suatu daerah. Alokasi pembelajaran daerah ini dinantikan dapat meningkatkan ketertarikan masyarakat pada daerah babel dengan membenahi dan meningkatkan kualitas infrastruktur, transportasi, dan sumber daya manusia daerah. Pemerintah harus menyikapi hal ini dengan serius untuk mencapai hasil sebaik-baiknya bagi kesejahteraan daerah serta masyarakatnya. Data Belanja daerah Provinsi 7 Kabupaten/kota Kepulauan Bangka Belitung periode 2013-2020 sebagai berikut.



Sumber: Direktorat Jendral Pajak Kemenkeu (2013-2020)

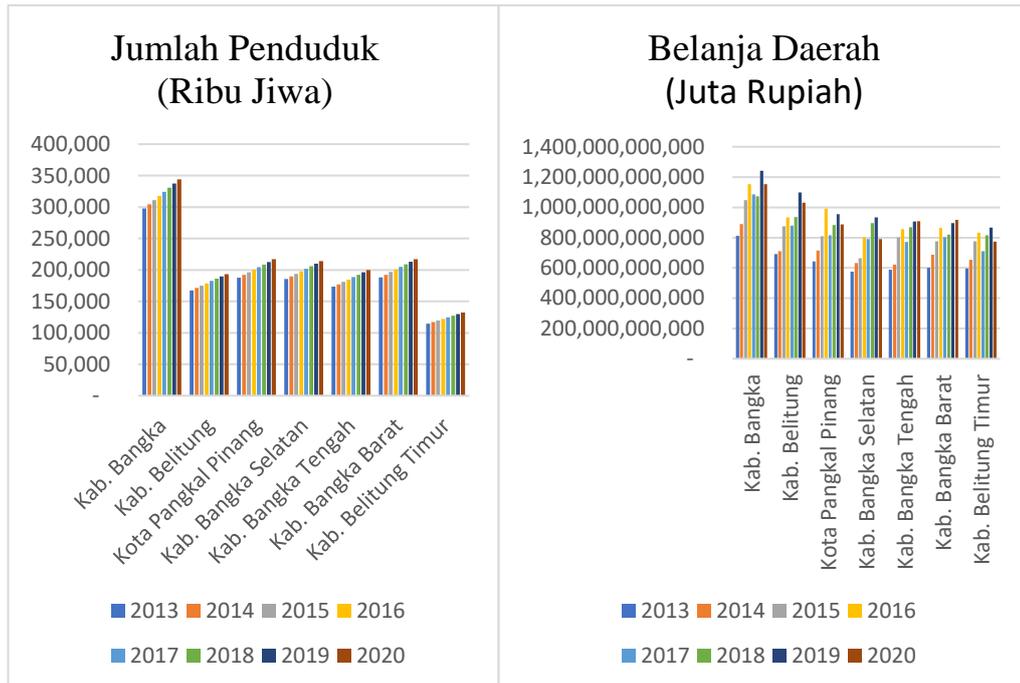
Laila Mulia Dayanti, 2023

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan
www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id

Gambar 2. Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung 2013-2020

Belanja Daerah tahun 2013-2016 terjadi peningkatan pada kabupaten dan kota Provinsi Bangka Belitung namun setelah 2016-2020 mengalami fluktuasi. Dapat dilihat dari tahun 2016- 2017 di semua kabupaten / kota Provinsi Bangka Belitung mengalami penurunan belanja daerah secara bersamaan, penurunan yang paling banyak terjadi pada kota pangkal pinang yang pada tahun 2016 sebesar Rp.990,400,827 lalu menurun sebesar Rp. 816,819,790. Belanja Daerah tertinggi terjadi di Kabupaten Bangka sebesar Rp. 1,242,579,345 lalu yang paling rendah yaitu Kabupaten Bangka Selatan yaitu Rp. 710,661,361. Penurunan yang tidak biasa ini di dalam Belanja Daerah terdapat ketidaksesuaian, dimana penurunan realisasi kota lebih tinggi pengeluarannya daripada kabupaten yang seharusnya kota memiliki belanja daerah yang tinggi dikarenakan kota pangkal pinang sebagai pusat administrasi dari provinsi Bangka Belitung itu sendiri. Jadi dapat kita lihat jelas bahwa penerimaan dan pengeluaran pemerintah berbeda-beda dari daerah ke daerah pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan 6 Kabupaten serta 1 Kota. Tiap pembelanjaan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan pendapatan yang dimiliki yaitu penerimaan dari potensi suatu daerah. Dalam penelitian ini diduga adanya fluktuasi pembelajaan daerah diberbagai kabupaten dan kota yang terdapat pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diakibatkan pada beberapa variabel salah satunya yakni jumlah penduduk, dengan kondisi keadaan sebagai berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2013-2020)

Gambar 3. Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2013- 2020 (Ribu Jiwa)

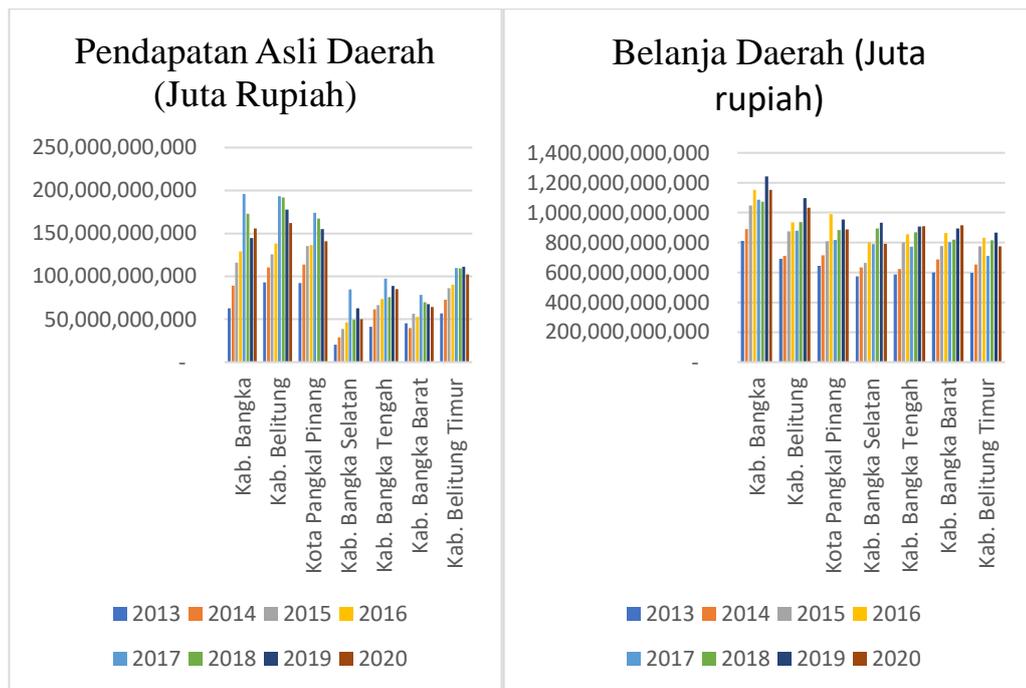
Gambar diatas menunjukkan jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013- 2020 terus naik setiap tahunnya, tahun 2016-2017 jumlah penduduk dari 7 kab/kota Provinsi Bangka Belitung naik namun pada belanja daerah diseluruh kab/kota pada kepulauan bangka belitung di 2016-2017 mengalami penurunan, bahkan pada kabupaten bangka terjadi penurunan selama 2 tahun di belanja daerah pada tahun 2016-2018. Lalu 2019-2020 juga adanya fenomena dimana jumlah penduduk diseluruh kab/kota pada kepulauan bangka belitung yang ada pada 2019-2020 mengalami kenaikan namun pembelajaan daerah di 5 kab/kota kepulauan bangka belitung menurun yaitu terdapat pada kabupaten bangka, kabupaten belitung, kota pangkal pinang, kabupaten bangka selatan, dan kabupaten belitung timur, penyebab dari turunnya belanja daerah dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang melanda. Hal ini kurang sejalan dengan teori dari Adolf Wagner yang seharusnya jika bertambahnya jumlah penduduk tentu juga akan bertambah pula belanja daerah untuk memenuhi kebutuhannya pada provinsi tersebut. Menurut Birds (1971), Dimitrios & Richter dalam jurnal (Handayani, Suryati, Marsela, Luqmana, & Anwar, 2022). menunjukkan bahwa setidaknya ada tiga pertahanan (pembelaan) untuk hukum Wagner. Pertama, bahwa tugas

Laila Mulia Dayanti, 2023

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

administratif dan tugas melindungi warga negara terkait dengan kegiatan pembangunan pemerintah. Tingkat substitusi antara kegiatan publik dan swasta mengungkapkan hal ini perubahan yang disebabkan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi merupakan indikator tambahan dari keadaan ini. Untuk menjaga ketertiban di perkotaan, perubahan ini akan menuntut peningkatan pengadaan sarana publik (perumahan, sarana sanitasi, fasilitas pendidikan, kesehatan, dll).



Sumber: Direktorat Jendral Pajak Kemenkeu (2013-2020)

Gambar 4. Grafik Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2013- 2020 (Juta Rupiah)

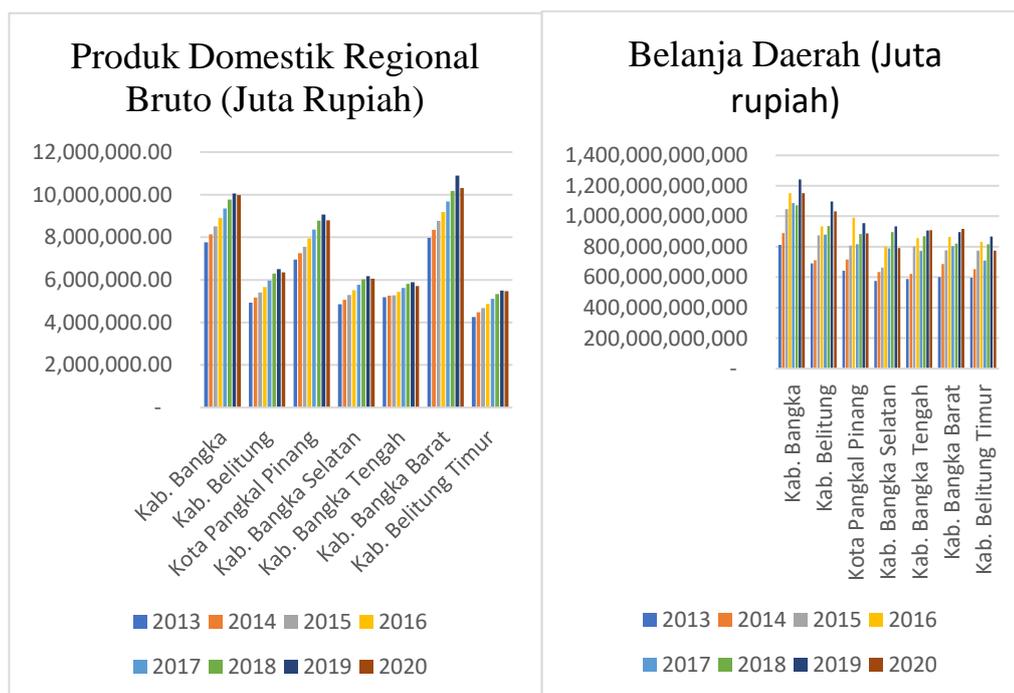
Dapat dilihat Gambar 4. PAD tahun 2013-2014 dan 2015-2016 Kabupaten Bangka Barat mengalami penurunan sedangkan belanja daerahnya meningkat. Lalu, di tahun 2016-2017 PAD diseluruh kab/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan namun pembelajaan daerah di tahun yang sama mengalami penurunan. Di tahun 2017-2018 PAD mengalami penurunan di setiap tahunnya namun belanja daerah 6 kab/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat. Lalu 2019-2020 Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten bangka mengalami kenaikan, namun belanja daerahnya malah menurun, begitu juga sebaliknya pada kabupaten bangka barat di tahun 2019-2020 PAD menurun namun belanja daerahnya meningkat. Dari hal tersebut artinya tidak searah dengan teori Peacock & Wiseman bahwa Pendapatan Asli Daerah juga dapat memajukan

Laila Mulia Dayanti, 2023

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

pemerintah daerah lebih baik. (Helmayunita & Fadilah, 2020) menjelaskan kalau penerimaan PAD yang banyak akan berbanding positif pada sumber keuangan daerah yang dimilikinya. Lalu disisi teoritis, PAD dapat mempengaruhi besar kecilnya belanja daerah. Jika disimpulkan seharusnya dengan naiknya PAD belanja daerah juga akan meningkat dan sebaliknya. Hal ini selaras pada teori belanja pemerintah dari Peacock dan Wiseman yang mengatakan pajak dari populasi umum digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah. PAD ialah salah satu jenis pendapatan daerah yang berasal pada peluang sumber daya yang suatu saat dapat dimiliki daerah. Masuk akal jika daerah dengan PAD tinggi akan menggunakan uang ini untuk menutupi pengeluaran mereka terkait menjalankan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Kemampuan daerah untuk memenuhi tuntutannya sendiri secara independen dari pemerintah pusat meningkat seiring dengan PAD yang dicapai daerah tersebut.



Gambar 5. Grafik PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2013- 2020 (Juta Rupiah)

Berdasarkan gambar 5 PDRB kab/kota Provinsi Bangka Belitung periode 2013 sampai 2020 yang paling tinggi adalah Kabupaten Bangka Barat, lalu PDRB ADHK yang terkecil adalah Kabupaten Belitung Timur. Kemudian tahun 2016-2017 PDRB kab/kota Provinsi Bangka Belitung mengalami kenaikan namun jika

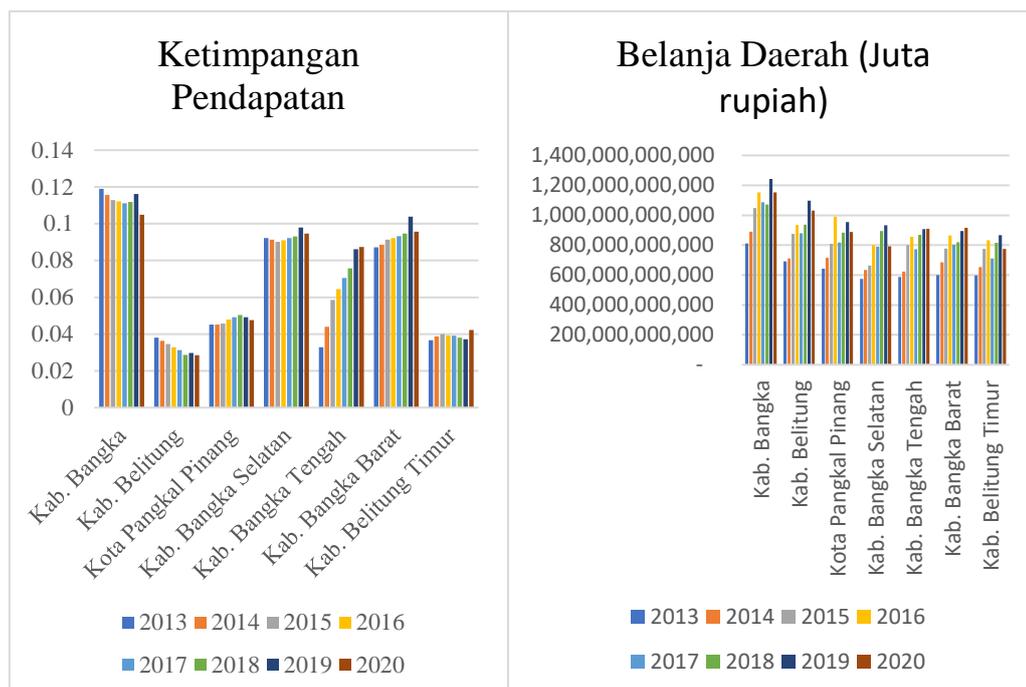
Laila Mulia Dayanti, 2023

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

dilihat pada Pembelanjaan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung di tahun yang terdapat penurunan. Di tahun 2017-2018 PDRB pada kabupaten Bangka mengalami kenaikan namun belanja daerahnya mengalami penurunan. Lalu 2019-2020 PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung terdapat penurunan akan tetapi belanja daerah di Kabupaten Bangka Tengah serta Kabupaten Bangka Barat meningkat. Hal ini tentu adanya fenomena yang terjadi karena dalam teorinya. Untuk menaikkan belanja daerah, jumlah PDRB diharuskan meningkat juga. Akibatnya, pemerintah pusat lebih banyak mengalokasikan dana untuk meningkatkan potensi daerah yang ada untuk kepentingan pelayanan publik, semakin tinggi PDRB juga akan semakin tinggi pendapatan yang diperoleh kab/kota, seiring dengan tingginya pendapatan yang diterima daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah biasanya dinilai dengan menggunakan PDRB. Menurut teori Peacock dan Wiseman tentang evolusi pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi (PDB) mengarah pada peningkatan pengumpulan pajak meskipun tarif pajak tetap sama, dengan peningkatan pendapatan pajak juga menyebabkan pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi.

Beberapa penelitian sebelumnya yang mencoba melihat hal yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu penelitian dari Rike Yolanda Panjaitan (2021), Ivoni Ike Liando & Suwardi Bambang Hermanto (2017), dan Elen Nesiya Pratiwi (2019). Hasil perolehan penelitian ini keseluruhan variabel dependen yang digunakan berpengaruh pada variabel terikat.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2013-2020)

Gambar 6. Grafik Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2013- 2020

Dari gambar di atas bahwa angka ketimpangan pada kab/ kota provinsi bangka belitung masih sangat tinggi yaitu di atas 0.35 yang mana menggambarkan bahwa ketimpangan yang terjadi sangatlah tinggi dan banyak juga yang diatas 0.5 angka ketimpangan disuatu kab/kota provinsi bangka belitung. Menurut Keynes PDB suatu negara atau PDRB suatu daerah termasuk pengeluaran pemerintah. Karena beberapa produk serta jasa yang diperoleh pada perekonomian tidak dapat dipertukarkan, pembayaran transfer tidak termasuk dalam pengeluaran pemerintah. Naiknya pengeluaran yang diproyeksikan pada seluruh tingkatan pendapatan adalah hasil dari belanja pemerintah yang lebih tinggi sebagai komponen pengeluaran. Ketimpangan pendapatan akan menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat serta belanja daerah akan naik begitu juga kebalikannya apabila pembelajaan daerah menurun maka ketimpangan tinggi. Fenomena yang terjadi yaitu Ketimpangan Pendapatan di 4 kab/ kota provinsi bangka belitung tahun 2013-2015 ketika Ketimpangan Pendapatan naik belanja daerahnya naik, 2015-2016 ketika gini ratio naik belanja daerahnya naik di 4 kab/ kota provinsi bangka belitung, 2016- 2017 ketika Ketimpangan Pendapatan turun belanja daerahnya menurun di 3 kab/ kota provinsi bangka belitung, 2017-2018

Laila Mulia Dayanti, 2023

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

ketika Ketimpangan Pendapatan naik belanja daerahnya naik di 4 kab/ kota provinsi bangka belitung, 2018-2019 ketika Ketimpangan Pendapatan naik belanja daerahnya naik di 4 kab/ kota provinsi bangka belitung, 2019-2020 ketika Ketimpangan Pendapatan turun belanja daerahnya menurun di 4 kab/ kota provinsi bangka belitung, 2019-2020 ketika Ketimpangan Pendapatan naik belanja daerahnya naik di Kab. Bangka tengah. pengaruhnya ketimpangan pendapatan pada belanja daerah hal ini searah dengan penelitian (Sutiono, 2018) yang mengatakan alokasi belanja modal APBD dapat mempengaruhi secara positif signifikan pada ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka diperlukan suatu penelitian terkait topik ini yang bertujuan untuk mengetahui apakah benar bahwa Belanja Daerah bisa dipengaruhi banyak faktor diantaranya adalah Jumlah Penduduk, PAD, dan PDRB, dan Ketimpangan Pendapatan. Hal tersebutlah menjadikan latar belakang temuan ini yaitu **“Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”**

1.2 Perumusan Masalah

Pembelajaan daerah pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung fluktuasi. Provinsi babel termasuk kedalam 5 Provinsi dengan pendapatan daerah terendah di Indonesia sehingga berdampak juga pada belanja daerahnya. Tahun 2013-2014 ketika pendapatan daerah meningkat, belanja daerah pada 4 provinsi juga meningkat, namun berbeda dengan belanja daerah yang terdapat pada Provinsi babel malah menurun. Adanya penurunan belanja daerah yang cukup jauh pada kota pangkal pinang dibandingkan dengan kabupaten lain di tahun 2016. Tahun 2019-2020 karena efek dari pandemi covid 19. Belanja daerah pada Provinsi babel yang menurun jauh dibandingkan ke empat Provinsi lainnya, selisihnya mencapai 200,905,929,485.29. Setelah melihat latar belakang masalah, penelitian ini mempunyai masalah yang terdapat pada Belanja daerah, berdasarkan adanya fenomena yang ada pada provinsi Kepulauan Bangka Belitung jadi bisa mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada Belanja daerah serta bagaimana pengaruhnya faktor-faktor pada pembelajaan daerah kab/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sehingga permasalahan yang ingin diangkat di dalam temuan ini yaitu:

Laila Mulia Dayanti, 2023

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

- a. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota Provinsi kepulauan Bangka Belitung?
- b. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota Provinsi kepulauan Bangka Belitung?
- c. Bagaimana pengaruh pendapatan domestik regional bruto terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota Provinsi kepulauan Bangka Belitung?
- d. Bagaimana pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota Provinsi kepulauan Bangka Belitung?

1.3 Tujuan Penelitian

Dapat dilihat dari perumusan masalah maka tujuannya dari pemelitian ini yaitu:

- a. Mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota Provinsi kepulauan Bangka Belitung.
- b. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota Provinsi kepulauan Bangka Belitung.
- c. Mengetahui dan menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota Provinsi kepulauan Bangka Belitung.
- d. Mengetahui dan menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota Provinsi kepulauan Bangka Belitung.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat teoritis dari temuan ini yaitu :

- a. Manfaat Teoritis

Untuk peneliti selanjutnya, temuan ini diharapkan bisa dijadikan pijakan serta sumber pengetahuan dalam melakukan temuan selanjutnya yang diharapkan dapat menjadi aplikasi/ influentasi terhadap Teori Adolf Wagner serta Peacock & wiseman yang berhubungan dengan faktor-faktor yang memengaruhi Belanja Daerah kab/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013-2020. Serta temuan ini menutup kesenjangan hasil penelitian sebelumnya yang tidak memasukan variabel Jumlah Penduduk, PAD, dan PDRB, dan Ketimpangan Pendapatan.

Laila Mulia Dayanti, 2023

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

- b. Manfaat Praktis
 - 1. Bagi pemerintah, diharapkan temuan ini bisa dijadikan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan atau langkah yang tepat untuk beberapa pembuat kebijakan (*policy maker*) bagi pemerintah pusat terutama pemerintah daerah.
 - 2. Untuk masyarakat diharapkan bisa mendapatkan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi belanja daerah dan diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar kewajibannya yaitu pajak agar dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah sehingga berdampak pada belanja daerah.